



## Analisis Minat Politik Kaum Muda Dalam Menyikapi Pemerintahan Era Jokowi 2019-2023 (Studi kasus pada mahasiswa Jombang)

**Binti Nasikhatul Walidaini**  
Universitas Darul Ulum

**Nieke Rudyanty winanda**  
Universitas Darul Ulum

**Hudallah Hudallah**  
Universitas Darul Ulum

Alamat: Jl. Gus Dur No 29 AJombang 61453

Korespondensi penulis: [idawalidaini31@gmail.com](mailto:idawalidaini31@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze the political interest of young people in Jombang during the reign of President Joko Widodo (Jokowi) and the factors that influence the political interest of young people. This type of research is qualitative, this research explores various forms of formal and non-formal political participation carried out by young people. The data collection technique used a purposive method with eight student informants spread across four universities in Jombang. Source of data obtained based on primary data and secondary data. To collect data, researchers used observation techniques, in-depth interviews, and documentation studies. The data analysis model used is data collection, data reduction, data presentation and conclusion. The results of this study indicate that the political participation of young people increased during the Jokowi administration, influenced by information disclosure, access to technology, and contemporary issues that are of concern to the younger generation. Nonetheless, there are still challenges in empowering youth political participation, including structural barriers and lack of representation in public policies. From the results of this study it can be concluded that the importance of empowering youth in the political decision-making process in Indonesia to ensure a more inclusive future of democracy and the factors causing youth's lack of interest in politics include the political perception that it is boring to discuss and follow developments. political and economic education.*

**Keywords:** *young people's political interest, Jokowi government.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis minat politik kaum muda di jombang selama pemerintahan presiden joko widodo (jokowi) serta faktor faktor yang mempengaruhi minat politik kaum muda. Jenis Penelitian ini adalah kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi berbagai bentuk partisipasi politik formal dan non formal yang dilakukan oleh kaum muda. Teknik pengumpulan data menggunakan metode purposive dengan jumlah informan delapan orang mahasiswa yang tersebar di empat universitas di jombang. Sumber data yang diperoleh berdasarkan data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Model analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan perikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik kaum muda meningkat selama pemerintahan jokowi, di pengaruhi oleh keterbukaan informasi, akses teknologi, serta isu isu kontemporer yang menjadi perhatian generasi muda. Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam pemberdayaan partisipasi politik kaum muda, termasuk hambatan struktural dan kurangnya representasi dalam kebijakan publik. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan pentingnya pemberdayaan kaum muda dalam proses pengambilan keputusan politik di indonesia untuk memastikan masa depan demokrasi yang lebih inklusif serta faktor faktor yang menjadi penyebab kurangnya minat politik kaum muda antara lain karena persepsi politik yang membosankan untuk dibahas serta di ikuti perkembangannya, pendidikan politik serta ekonomi

**Kata kunci:** minat poltik kaum muda, pemerintahan Jokowi.

## LATAR BELAKANG

Berbicara mengenai politik merupakan suatu hal yang menarik, di ruang kelas, warung kopi atau ruang ruang publik lainnya menjadi tempat yang nyaman untuk membahas dunia politik. Tak hanya kalangan generasi tua, generasi muda pun tidak mau kalah dalam menanggapi politik saat ini. Untuk sekedar membahas isu isu politik yang tengah ramai saat ini atau mengenai kebijakan kebijakan pemerintah yang di anggap krusial dan tidak tepat sasaran. Namun hanya beberapa kaum muda saja yang menganggap politik merupakan hal yang menarik untuk di bahas. Sebagian lain menganggap politik hanya untuk kaum kuno atau generasi tua yang tidak menarik untuk menjadi bahan perbincangan.

Era demokrasi saat ini menuntut kawula muda untuk turut berpartisipasi dalam kebijakan kebijakan yang pemerintah tetapkan guna menciptakan generasi muda yang melek atau peduli dengan tanah airnya. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kesadaran pemuda pemudi untuk turut andil dan berpartisipasi. Pemerintah mempunyai peran besar untuk menciptakan atau merubah citra politik agar lebih terlihat menarik dan tidak terkesan stagnan.

Generasi muda saat ini sendiri tengah menjadi bahan perbincangan di semua lapisan masyarakat, karena generasi muda yang diharapkan menjadi penerus bangsa atau tonggak bangsa ini tentunya harus mempunyai bekal ilmu. Pentingnya pendidikan politik tak dapat diabaikan, sebab kesadaran politik perlu ditanamkan sejak dini pada generasi muda. Ini menjadi langkah awal yang krusial dalam mengembangkan pemahaman tentang pentingnya ikut serta dalam proses berpartisipasi politik.

Momentum yang paling mencolok dalam politik generasi milenial terjadi saat pemilihan umum (pemilu). Hasil survei yang dilakukan oleh Center of Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan bahwa partisipasi pemilih muda di Indonesia mengalami peningkatan dari pemilu 2014 hingga pemilu 2019. Pada pemilu 2014, sekitar 85,9% dari responden menyatakan mereka telah memilih. Namun, sekitar 11,8% memilih untuk tidak memberikan suara dan 2,3% tidak memberikan jawaban. Pada pemilu 2019, proporsi pemilih yang berpartisipasi meningkat. Sekitar 91,3% dari responden mengklaim mereka telah memilih dalam pemilu 2019, sementara 8% memilih untuk tidak memberikan suara, dan 0,7% tidak memberikan jawaban. Saat ini, pemilih di Indonesia didominasi oleh kalangan anak muda berusia antara 17 hingga 39 tahun. (cindy mutia annur, 2022)

Minat politik dari kalangan kaum muda dapat dianalisis dari berbagai perspektif, dan salah satu indikatornya adalah seberapa sering mereka mengikuti berita politik atau isu-isu kebijakan pemerintah dalam satu hari. Menurut hasil riset yang dilakukan oleh IDN Research Institute yang tertuang dalam laporan "Indonesian Millennial Report 2019," ternyata hanya 23,4 persen dari kaum muda yang menunjukkan minat dalam mengikuti berita politik. Generasi milenial cenderung memiliki pandangan bahwa politik lebih relevan bagi mereka yang lebih tua atau dianggap kuno.

Melihat ciri khas dari generasi milenial yang umumnya cenderung apatis terhadap urusan politik, pendidikan politik menjadi semakin penting. Hal ini mengingat kaum muda atau generasi milenial memiliki peran signifikan sebagai penerus bangsa. Dengan memberikan pendidikan politik yang memadai, diharapkan pandangan dan partisipasi kaum muda dalam ranah politik dapat ditingkatkan, mengingat pentingnya peran mereka dalam membentuk masa depan negara. Partisipasi politik memiliki peranan yang fundamental dalam sistem demokrasi. Ini menjadi salah satu tanda dari modernisasi dalam ranah politik. Keputusan-keputusan politik yang memiliki dampak signifikan pada kehidupan warga negara diputuskan dan dijalankan oleh pemerintah, seperti yang dijelaskan oleh Slamet (2003). Dalam konteks ini, ada tiga konsep utama partisipasi yang menjadi kunci, terutama ketika terhubung dengan proses pembangunan masyarakat yang berorientasi pada prinsip-prinsip demokratis. Konsep-konsep tersebut adalah partisipasi politik (political participation), partisipasi sosial (social participation), dan partisipasi warga (citizen participation/citizenship). Partisipasi politik merupakan isu penting dalam analisis politik kontemporer dan telah dipelajari secara ekstensif baru-baru ini, terutama dalam kaitannya dengan negara-negara berkembang. Awalnya kajian partisipasi politik terfokus pada partai politik sebagai aktor utama, namun seiring berkembangnya demokrasi, banyak komunitas berusaha mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan politik secara umum. Gerakan masyarakat baru atau generasi muda kecewa dengan kinerja politik. Kelompok-kelompok ini cenderung hanya fokus pada isu-isu tertentu dengan harapan dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan secara lebih efektif melalui aksi langsung. Pengungkapan pandangan masyarakat dengan bebas, baik secara lisan maupun tertulis, harus tetap dijaga agar semua struktur sosial dan lembaga, termasuk infrastruktur dan tata kelola lebih tinggi, tetap terlindungi dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang tidak sesuai dengan niat, tujuan, dan arah dari proses transparansi dalam pembentukan dan penegakan hukum. Hal ini bertujuan untuk

mencegah terjadinya disintegrasi sosial dan sebaliknya, memberikan jaminan akan keamanan dalam kehidupan bersosialisasi. Oleh karena itu, kebebasan berbicara di depan umum harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum internasional yang dijelaskan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Upaya peningkatan partisipasi politik kaum muda sendiri di Indonesia harus di tempatkan dalam proses transisi bangsa Indonesia menuju sistem politik yang lebih demokratis. Sementara itu, pemerintahan sendiri membutuhkan partisipasi politik bangsa, khususnya generasi muda, sebagai penerus bangsa. Dalam hal ini siswa dan mahasiswa dalam mengawasi pemerintahan agar tetap tidak memihak dan berkomitmen dalam memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat atau warganya. Oleh karena itu generasi muda merupakan komponen penting yang harus dilibatkan dalam pembangunan negara.

Pada zaman ini, kita berada dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), negara kita adalah negara kebangsaan dan negara kesejahteraan yang demokratis, berlandaskan Pancasila. Ketika mengumumkan kemerdekaan dan merancang sistem penyelenggaraan pemerintahan untuk Negara Indonesia yang merdeka, para pendiri republik sadar bahwa bentuk negara kebangsaan dan kesejahteraan yang demokratis merupakan sebuah cita-cita yang diemban sesuai dengan semangat pembukaan UUD 1945.(soedijarto, 2011)

pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak untuk mengemukakan pendapatnya, serta memiliki hak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan dalam konteks yang sesuai (Buku Super Lengkap UUD 1945 dan Amandemen, 2016:65).

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebebasan untuk menyuarakan pendapat sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, khususnya pada Pasal 19 yang berbunyi: “ hak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat”.Era pemerintahan presiden Jokowi dapat terbilang merupakan era pemerintahan yang menempatkan kaum muda di berbagai posisi dalam kabinetnya. Mulai dari kementerian hingga staff khusus kepresidenannya yang ditempati oleh anak muda Indonesia dengan berbagai bakat yang mumpuni, beberapa anak muda Indonesia yang menempati posisi sebagai staff khusus

kepresidenan diantaranya yang paling disoroti ialah putri tanjung, putri indahsari tanjung kusuma atau akrab di sapa putri tanjung ini jebolan sarjana Academy Of Arts di San Fransisco. Dengan umur yang masih menginjak di angka 23 tahun namun kiprahnya tidak bisa diragukan lagi. Putri tanjung dikenal sebagai *entrepreneur* dan menjadi CEO di *creativpreneur*. Hal ini kemudian menjadikan era kepemimpinan jokowi menjadi lebih fresh dan terbilang menarik untuk diamati oleh kaum muda indonesia. Keterlibatan kaum muda dalam kabinetnya menjadi jembatan untuk kaum muda lainnya dalam menyampaikan aspirasi dan inovasi terbaru. Dari segi teoritis, negara demokrasi memiliki potensi yang lebih besar untuk mendorong munculnya politisi muda yang dapat berperan dalam posisi teratas partai dan panggung politik nasional. Namun, budaya politik yang belum sepenuhnya demokratis seringkali masih mengandung unsur tradisional di mana politisi senior cenderung mempertahankan kekuasaan mereka. (Azyumardi azra, 2015)

Jagat perpolitikan di Indonesia tampaknya masih dikuasai oleh politisi senior, hal ini kemudian semakin membuat dunia politik terasa kolot dan tidak segar. Perubahannya tidak membuat perpolitikan di Indonesia menjadi lebih baru dan menyesuaikan kaum muda, tapi masih berpegang pada prinsip prinsip usang. Hal ini dapat dikatakan sebagai kategori dari gerontokrasi. Gerontokrasi adalah bentuk hubungan sosial tertentu. Secara umum, gerontokrasi merujuk pada masyarakat yang dipimpin oleh individu-individu yang telah memasuki usia tua. Ciri-ciri yang sering terlihat dalam kepemimpinan gerontokrasi mencakup sifat konservatif, lambat dalam perubahan, dan memiliki kecenderungan kaku. Gerontokrasi yang merugikan bagi demokrasi perlu dikurangi atau setidaknya dikendalikan, jika tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Untuk mencapai hal ini, diperlukan kesediaan tulus dari politisi senior untuk memberi ruang kepada regenerasi dalam dunia politik. Dengan cara ini, kita dapat berharap agar demokrasi menjadi lebih sehat dan berdinamika. Era kepemimpinan presiden jokowi terdapat beberapa kebijakan yang krusial. Salah satunya diciptakannya UU cipta kerja atau biasa di sebut juga UU ciptaker. Kaum muda sebagai *agen of change* tentu menjadi sasaran empuk masyarakat yang merasa dirugikan atas di sahkannya UU cipta kerja tersebut. Dalam hal ini penolakan dari kalangan buruh yang paling gencar menyuarakan penolakan atau kontranya. Apalagi ketika itu banyak draf draf RUU cipta kerja yang berseliweran di masyarakat. Masyarakat serta golongan kaum muda yang dalam hal ini diwakilkan oleh para mahasiswa dan pelajar, menuding pemerintah menghilangkan hak hak pekerja demi memaskan elite perusahaan. Tingkat penolakan semakin meningkat, aksi demonstrasi beruntun terus dilancarkan di berbagai daerah dengan harapan bahwa pemerintah akan lebih

memperhatikan kepentingan para pekerja atau buruh daripada kepentingan elit perusahaan. Presiden Jokowi sempat memberikan instruksi untuk menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan hingga 24 April 2020 dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kembali kepada usulan dari kalangan pekerja. Namun, pada kenyataannya, baik pemerintah maupun DPR bergerak dengan cepat dalam merumuskan undang-undang ini. Bahkan, walaupun dalam masa pandemi, proses pembahasan omnibus law cipta kerja tidak terhenti.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, masyarakat dikejutkan oleh pengesahan resmi Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang. Hal ini menimbulkan kesan bahwa prosesnya terlalu terburu-buru. Akibatnya, berbagai aksi massa kembali terjadi. Para buruh dan kaum muda merasa bahwa ada sejumlah kekurangan dalam segi formal dalam proses pembuatan undang-undang ini. Dalam konteks ini, kaum muda memiliki kesempatan untuk menunjukkan eksistensinya dengan mengartikulasikan suara-suara masyarakat, menjadi penghubung antara rakyat dengan kebijakan.

## **KAJIAN TEORITIS**

### 1. (Syarifuddin Jurdi, 2012)

Dalam penelitian yang mengangkat dinamika politik kaum muda di Indonesia, khususnya dalam konteks dialektika politik nasional dan lokal, dijelaskan bahwa gerakan politik kaum muda sebelum kemerdekaan memiliki tujuan yang tegas dan idealisme yang kuat, yaitu mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Karena hal ini, gerakan politik kaum muda memiliki dasar ideologi yang jelas dalam arena politik Indonesia (ibid, hal. 5). Kemunculan kesadaran nasionalis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara penjajah dan bangsa yang dijajah, dan dari sinilah kaum muda yang terdidik diharapkan mampu memunculkan dan mengintensifkan konflik antara masyarakat Indonesia dengan penjajah.

Dalam beberapa situasi politik selama era Orde Baru, kaum muda cenderung terjerumus ke dalam pola kekuasaan yang bersifat oligarki. Idealisme yang biasanya dimiliki oleh kaum muda cenderung melemah dan tidak lagi memiliki pengaruh besar untuk membawa perubahan dalam dunia politik. Namun, ini juga menggambarkan bahwa kaum muda tetap memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan politik dalam negara.

Sebagai respons terhadap kondisi ini, pemberdayaan masyarakat menjadi tindakan politik yang dominan di kalangan kaum muda. Mereka terlibat dalam berbagai aksi politik yang memiliki ciri khas seperti keberpihakan pada keseimbangan sosial, visi jauh ke depan, dan komponen religius yang kuat. Hal ini menggambarkan semangat kaum muda untuk melakukan perubahan yang positif dan berkelanjutan dalam arena politik.

2. (M. Yordan Setiawan, 2021)

Rendahnya minat politik dapat dipengaruhi oleh stigma negatif terhadap politik, yang sering digambarkan sebagai sesuatu yang negatif, kotor, dan penuh dengan intrik. Menurut M. Yordan Setiawan (2021), jika pandangan tersebut masih banyak dipegang oleh sebagian kaum muda, maka hal ini dapat berlanjut dan mengakibatkan persepsi di kalangan milenial bahwa politik adalah tindakan yang tidak bermoral.

Indonesia saat ini telah memasuki era Industri 4.0, di mana setiap aspek kehidupan masyarakat mulai mengadopsi sistem otomatisasi untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, generasi milenial yang sering menjadi sorotan juga memiliki ciri-ciri individualistik, adanya keterlibatan yang tinggi terhadap isu-isu politik, serta cenderung menunjukkan sikap apatis terhadap dunia politik.

Dengan modal dan semangat yang dimiliki kaum milenial hal ini tentu harus dimanfaatkan untuk makin gencar memberi literasi khususnya mengenai demokrasi dan politik. Pendidikan itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi serta aktif dalam media sosial, membuat konten-konten pengertian yang baik namun dikemas dalam keadaan yang fresh, sehingga tidak ada lagi kejenuhan saat mengikuti berita-berita atau isu politik.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif Deskriptif. Dalam pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menggambarkan perilaku, pemikiran, atau perasaan individu, kelompok, atau fenomena tertentu. Pendekatan Deskriptif dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman mendalam dan interpretasi terhadap konteks dan makna di balik fenomena yang diteliti. Peneliti melakukan analisis rinci terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, atau sumber data lainnya, dengan tujuan untuk

memberikan gambaran yang mendalam tentang analisis minat politik kaum muda dalam menyikapi pemerintahan era Jokowi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Minat politik ialah ketertarikan dan perhatian terhadap kebijakan politik, pemilihan umum, partai politik, gerakan sosial serta partisipasi politik secara umum yang dilakukan atas dasar kemauan diri sendiri tanpa ada paksaan. Tentunya ada faktor faktor yang mendukung kaum muda untuk tertarik pada politik seperti lingkungan, pekerjaan, serta pendidikan. Pada pemerintahan era Jokowi ini cukup menyita perhatian kaum muda dalam mengambil kebijakan kebijakan yang di buat, utamanya dalam pembangunan infrastruktur pembangunan jalan tol, hal ini membuat masyarakat lebih mudah dalam melakukan perjalanan. Pada era pemerintahan Jokowi pun sempat mengalami keterpurukan akibat wabah pandemi covid-19 namun pemerintah di nilai telah bijak dalam mengambil langkah dengan memberlakukan PPKM serta WFH (work from home), dengan adanya kebijakan tersebut dapat mencegah penyebaran covid-19. Kaum muda biasa mendapatkan informasi berita politik dari media sosial, tak heran, karena sekarang sudah memasuki era digitalisasi yang semua sudah dimudahkan, termasuk berita berita ter update tentang pemerintahan/politik. Namun media sosial sendiri dapat menjadi boomerang apabila kaum muda tidak bisa menyaring informasi dengan baik serta tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Isu isu yang beredar di media sosial seakan akan menggiring opini kaum muda untuk kontra terhadap pemerintahan Jokowi, seperti isu 3 periode pemerintahan Jokowi yang tersebar di seluruh bangsa ini dengan cepat. Kaum muda kurang tertarik terhadap politik Indonesia karena permasalahan politik yang hanya itu itu saja, meski tidak tertarik untuk mengikuti perkembangan politik, namun kaum muda tetap berpartisipasi dalam memilih untuk menggunakan hak suara sebagai warga Indonesia. Politik pemerintahan Jokowi yang terkensan monoton membuat kaum muda tidak tertarik untuk mengikuti perkembangannya. Keadaan ini tentu menjadi PR bagi pemerintahan selanjutnya, sudah seharusnya pemerintah lebih memperhatikan lagi keadaan kaum muda yang digadang gadang akan menjadi penerus bangsa ini.

Minat politik yang dimiliki kaum muda masih minim, karena persepsi kaum muda yang masih menganggap politik adalah hal yang membosankan untuk di bahas. Namun peneliti menemukan faktor faktor lain yang menjadi dasar kaum muda tidak tertarik. Dari hasil

penelitian faktor faktor yang mempengaruhi minat politik kaum muda pada mahasiswa jombang adalah:

1. Persepsi politik

Ketidaktertarikan kaum muda dalam menyikapi politik kepemimpinan jokowi karna persepsi atau pandangan politik adalah suatu hal yang membosankan bagi sebagian kaum muda. Kondisi dan permasalahan politik indonesia yang masih saja hanya seputar korupsi, pemangkasan atau keringanan untuk tahanan koruptor, wakil rakyat dengan segala kontroversinya, baru baru ini wakil rakyat yang tertangkap cctv sedang berjudi pada saat rapat. Serta masih banyak lagi kontroversi kontroversi yang membuat kaum muda semakin enggan untuk mengikuti perkembangan politik pemerintahan jokowi.

2. Pendidikan politik

Pendidikan, menjadi salah satu faktor pendukung minat politik kaum muda. Kurang nya pendidikan pengetahuan tentang politik membuat kaum muda kurang begitu tertatik pada politik. Pendidikan politik bisa berupa sosialisasi, atau seminar yang dapat diadakan baik di universitas, pemerintahan kabupaten hingga pemerintahan desa. Hal ini perlu dilakukan untuk menyadarkan kaum muda bahwa politik bukan hanya berkutat pada korupsi, kolusi dan nepotisme.

3. Ekonomi

Ketika kebutuhannya terpenuhi, di barengi dengan fasilitas fasilitas yang di sediakan orang tua, bisa jadi membuat kaum muda lebih fokus dalam menempuh pendidikannya, tetapi masih ada waktu untuk mengikuti perkembangan perkembangan politik. Namun berbeda lagi dengan kondisi kaum muda yang perekonomiannya menengah kebawah, mereka lebih memilih fokus bekerja dan menyelesaikan pendidikannya ketimbang mengikuti perkembangan politik.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pada temuan dari penelitian dengan judul “Analisis Minat Politik Kaum Muda Dalam Menyikapi Pemerintahan Era Jokowi(studi kasus pada mahasiswa jombang)” maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwasanya sikap sebagian kaum muda saat ini dalam menyikapi pemerintahan era masa jokowi cenderung tidak responsif. Hal ini dikarenakan masih minimnya minat politik kaum muda.
2. Kurangnya kepercayaan kaum muda terhadap pemerintahan masa jokowi akibat banyaknya kasus korupsi serta kebijakan kebijakan yang dianggap mencederai rakyat.
3. Ada beberapa faktor penyebab kurangnya minat politik kaum muda saat ini antara lain
  - Persepsi politik : kaum muda memiliki persepsi yang buruk terhadap politik. Politik dianggap menjadi suatu hal yang membosankan untuk di bahas atau di ikuti. Yang menjadikan kaum muda memiliki stigma negatif berasal dari para pemangku jabatan yang bertindak mencederai rakyat, pemerintah dianggap kurang tegas dalam penindakan penindakan yang merugikan rakyat. Seperti halnya hukuman korupsi.
  - Pendidikan politik : kurangnya pendidikan menjadikan pengetahuan kaum muda dalam politik terbatas, meski di era ini digitalisasi sudah sangat memudahkan kaum muda untuk mendapatkan informasi tetapi sumber sumber yang di dapatkan belum tentu kredibilitasnya akurat.
  - Ekonomi : ekonomi yang kurang stabil membuat kaum muda harus bekerja untuk memenuhi atau membantu perekonomian keluarga. Mereka cenderung memilih fokus terhadap pekerjaan dan pendidikannya ketimbang mengikuti perkembangan politik.

Adapun saran peneliti mengenai ketertarikan atau minat politik kaum muda dalam menyikapi pemerintahan era jokowi, yaitu

1. Bagi mahasiswa jombang sudah seharusnya sadar akan pentingnya mengikuti perkembangan politik, karna jika kaum muda setempat kurang peduli dengan perkembangan politik maka siapa lagi yang akan menyuarakan serta menyalurkann suara rakyat jika wakil rakyatnya di anggap tidak mampu melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Bagi seluruh kaum muda, penting untuk bersikap objektif saat memilih atau menerima informasi mengenai dinamika politik.

3. Bagi pembaca hasil penelitian ini, peneliti menghargai kritik dan saran konstruktif yang dapat membantu perbaikan kemajuan penelitian ini.
4. Bagi penenliti selanjutnya, saat mengkaji analisis minat politik kaum muda terhadap pemerintahan era jokowi dengan studi kasus pada mahasiswa jombang, harap memastikan sumber informasi akurat dan mendalami dari pihak yang benar benar memiliki pengetahuan tentang subjek penelitian, serta melakukan observasi langsung di lapangan.

## DAFTAR REFERENSI

- Azyumardi azra. (2015, April). mengenal gerontokrasi. *Kompas.Com*.  
[https://nasional.kompas.com/read/2015/04/28/1500003/Politik.Gerontokrasi#:~:text=Secara teoretis%2C negara demokrasi lebih,memungkinkan munculnya politisi lebih muda.](https://nasional.kompas.com/read/2015/04/28/1500003/Politik.Gerontokrasi#:~:text=Secara%20teoretis%20negara%20demokrasi%20lebih,memungkinkan%20munculnya%20politisi%20lebih%20muda.)
- Cindy Mutia Annur. (2022). *No Title*. Databoks.  
[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/30/survei-partisipasi-pemilih muda-meningkat-pada-pemilu-2019](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/30/survei-partisipasi-pemilih-muda-meningkat-pada-pemilu-2019)
- Funny W Mukti. (2022). *partisipasi politik pemilih pemula dalam mewujudkan Negara demoktis. 12.*
- Kharisma. (2015). *No Title*.
- M. Yordan Setiawan. (2021). *milenial melek politik*. Milenial Melek Politik, Kenapa Tidak ?  
<https://www.unja.ac.id/milenial-melek-politik-kenapa-tidak/>
- Mulkanur Rohim dan Amika Wardana. (2019). *analisis politik milenial : persepsi siswa SMA terhadap Dinamika Politik pada pemilu 2019 di Indonesia.*
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.
- nova Bertriani Sinambela. Jeniarti artauli tampobolon, sabrina oktavia emmery nova, bernard itoloni harefa. (2021). *pengaruh tayangan mata najwa terhadap minat berpolitik mahasiswa UKI. vol 9 No 1.*
- Rank, E. (2023). *No Title*. <https://edurank.org/geo/jombang/>
- Rohmadi. (2021). *PTNU Rank*. <https://timesindonesia.co.id/pendidikan/357625/empat-kampus-di-jombang-masuk-44-ptnu-terbaik-seindonesia-versi-webometrics>
- S, M. (1997). *metode penelitian pendidikan*. rineka cipta.
- soedijarto. (2011). *No Title*. In *penyelenggaraan hak pendidikan bangsa* (p. 1).  
[https://www.researchgate.net/publication/337590774\\_POLITIK\\_HUKUM\\_PENDIDIKAN\\_NASIONAL\\_DALAM\\_UNDANG-UNDANG\\_NOMOR\\_20\\_TAHUN\\_2003\\_TENTANG\\_SISTEM\\_PENDIDIKAN\\_NASIONAL](https://www.researchgate.net/publication/337590774_POLITIK_HUKUM_PENDIDIKAN_NASIONAL_DALAM_UNDANG-UNDANG_NOMOR_20_TAHUN_2003_TENTANG_SISTEM_PENDIDIKAN_NASIONAL)
- Syarifuddin Jurdi. (2012). *No dinamika politik kaum muda indonesia : dialektika politik nasional dan lokal. 6.*